

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Landasan Teori

1. Teori Agensi

Konsep teori keagenan (*agency theory*) adalah hubungan atau kontrak antara pemilik perusahaan sebagai prinsipal dengan pihak manajemen sebagai agen yang sering disebut sebagai *agency relationship*. Prinsipal mempekerjakan agen demi kepentingan prinsipal, termasuk pendelegasian otorisasi pengambilan keputusan dari prinsipal kepada agen. Pada perusahaan yang modalnya terdiri atas saham, pemegang saham bertindak sebagai prinsipal, dan CEO (*Chief Executive Officer*) sebagai agen mereka. Perspektif hubungan keagenan merupakan dasar yang digunakan untuk memahami hubungan antara manajer dan pemegang saham. Menurut Jensen dan Meckling (1976) menyatakan bahwa hubungan keagenan adalah sebuah kontrak antara manajer (agen) dengan pemegang saham (prinsipal). Dari hubungan keagenan tersebut kadang menimbulkan konflik antara manajer dan pemegang saham.

Adanya konflik yang terjadi antara prinsipal dengan agen seperti yang dikemukakan di atas karena teori agensi menggunakan asumsi sifat dasar manusia, asumsi keorganisasian, dan asumsi informasi seperti yang dikemukakan Eidenhardt (1989) dalam Ujiyantho dan Pramuka (2007) yaitu :

Tiga asumsi dasar sifat manusia menekankan bahwa manusia umumnya mementingkan diri sendiri (*self interest*), manusia memiliki daya pikir terbatas mengenai persepsi masa mendatang (*bounded rationality*), manusia selalu menghindari resiko (*risk averse*). Berdasarkan tiga asumsi sifat dasar manusia tersebut, pemegang saham dan manajer memiliki kepentingan yang berbeda dan menginginkan tujuan mereka dapat terpenuhi. Pemegang saham



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



ditanggung oleh prinsipal untuk memonitor perilaku agen, yaitu untuk menguku, mengamati, dan mengontrol perilaku agen. *Bonding cost* merupakan biaya yang ditanggung oleh agen untuk menetapkan dan mematuhi mekanisme yang menjamin bahwa agen akan bertindak untuk kepentingan prinsipal. Selanjutnya *residual loss* adalah pengorbanan yang berupa berkurangnya kemakmuran prinsipal sebagai akibat dari perbedaan keputusan agen dan keputusan prinsipal.

2. Teori Akuntansi Positif

Menurut Scott (2009:284) teori akuntansi positif adalah:

“Positive accounting theory (PAT) is concerned with predicting such as actions as choices of accounting policies by firm managers and how managers will respond to proposed new accounting standards.”

Teori akuntansi positif menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi manajemen dalam memilih prosedur akuntansi yang optimal dan mempunyai tujuan tertentu. Menurut teori akuntansi positif, prosedur akuntansi yang dilakukan oleh perusahaan tidak harus sama dengan yang lainnya, namun perusahaan diberi kebebasan untuk memilih salah satu alternatif prosedur yang tersedia untuk meminimumkan biaya kontrak dan memaksimalkan nilai perusahaan. Dengan adanya pemilihan kebijakan akuntansi merupakan kebebasan manajemen sehingga membuka peluang bagi manajemen dalam memilih kebijakan akuntansi yang menguntungkan dan memaksimalkan kepuasan perusahaan. Teori akuntansi positif berusaha untuk menjelaskan fenomena akuntansi yang diamati berdasarkan pada alasan-alasan yang menyebabkan terjadinya suatu peristiwa. Dengan kata lain, teori akuntansi positif dimaksudkan untuk menjelaskan dan memprediksi konsekuensi yang terjadi jika manajer menentukan pilihan tertentu. Menurut Watts dan Zimmerman (1986 : 200), perilaku oportunistis manajer didasarkan pada tiga hipotesis yang akan dibahas pada bagian lain dalam bab ini.



3. Manajemen Laba

a) Definisi Manajemen Laba

Definisi manajemen laba menurut Scott (2015:445):

“Earnings management is the choice by manager of accounting policies, or real actions, affecting earning so as to achieve some specific reported earnings objective.”

Menurut Gulzar dan Wang (2011) manajemen laba dapat didefinisikan sebagai upaya penyesuaian atas laba perusahaan pada laporan kinerja keuangan perusahaan yang dilakukan oleh manajemen dalam mempengaruhi keputusan yang akan diambil oleh pihak eksternal perusahaan.

Berdasarkan teori-teori di atas, dapat di simpulkan manajemen laba adalah tindakan manajer memanfaatkan teknik dan kebijakan akuntansi guna mendapatkan hasil yang diinginkan. Dalam hal ini, hasil yang diinginkan oleh penyusun laporan keuangan dapat berupa penyajian nilai laba atau aset yang lebih tinggi atau lebih rendah.

Menurut H. Sri Sulistyanto (2008 :10) terdapat dua perspektif penting yang dapat dipergunakan untuk menjelaskan mengapa manajemen laba dilakukan oleh seorang manajer, yaitu :

(1) Perspektif Informasi

Perspektif informasi merupakan pandangan yang menyatakan bahwa manajemen laba merupakan kebijakan manajerial untuk mengungkapkan harapan pribadi manajer tentang arus kas perusahaan dimasa depan. Upaya mempengaruhi informasi itu dilakukan dengan memanfaatkan kebebasan untuk memilih, menggunakan, dan mengubah berbagai metode dan prosedur akuntansi yang ada. Sebagai contoh adalah metode FIFO, LIFO, dan rata – rata

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



untuk menentukan harga pokok penjualan atau metode depresiasi garis lurus, saldo menurun, dan jumlah angka tahun untuk mengalokasikan harga perolehan aktiva tetap. Penggunaan metode yang berbeda akan menghasilkan nilai yang berbeda pula. Oleh sebab itu, manajemen laba dapat dikatakan sebagai permainan akuntansi (*accounting games*).

Perspektif Oportunis

Perspektif oportunis merupakan pandangan yang menyatakan bahwa manajemen laba merupakan perilaku oportunis manajer untuk mengelabui investor dan memaksimalkan kesejahteraannya karena menguasai informasi lebih banyak dibandingkan pihak lain. Perilaku oportunis mengimplikasikan upaya manajer dalam mentransfer kemakmuran pemilik perusahaan kepada dirinya sendiri. Kesenjangan informasi yang di miliki manajer dengan pihak lain inilah yang mendorong manajer untuk berperilaku oportunis dalam mengungkapkan informasi – informasi penting mengenai perusahaan. Semakin besar asimetri informasi semakin besar dorongan bagi manajer untuk berperilaku oportunis. Kedua perspektif ini mempunyai hubungan sebab akibat yang mendorong terjadinya manajemen laba. Artinya, manajemen laba sebenarnya merupakan upaya oportunis seseorang untuk mempengaruhi informasi yang disajikan dengan memanfaatkan asimetri informasi.

Manajemen laba ini terjadi ketika manajer mulai menggunakan laporan keuangan sebagai alat untuk menstrukturisasi transaksi – transaksi yang ada sehingga dapat mempengaruhi laba yang akan dilaporkan yang bisa memberikan informasi mengenai keuntungan ekonomis yang sesungguhnya tidak dialami perusahaan. Hal ini biasanya kurang diketahui oleh pemilik perusahaan karena

© Hak cipta milik IBI BIKKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

pemilik perusahaan kurang memiliki informasi internal yang terjadi di dalam perusahaan.

Motivasi Manajemen Laba

Motivasi Manajer melakukan manajemen laba yang dirumuskan menjadi tiga hipotesis oleh Watts dan Zimmerman (1986 :200) dalam teori akuntansi positif. Tiga hipotesisi tersebut adalah :

1) *The Bonus Plan Hypothesis*

Dalam hipotesis kontrak bonus dikenal dua istilah yaitu *Bogey* (tingkat laba terendah untuk mendapatkan bonus) dan *Cap* (tingkat laba tertinggi). Manajer perusahaan yang memiliki rencana pemberian bonus cenderung memanipulasi metode akuntansi dengan menggeser laba dari periode mendatang ke periode tahun berjalan menurut Healy dalam Scott (2015:448) karena perusahaan yang memberikan bonus berdasarkan perolehan laba bersih perusahaan.

2) *Debt Covenant Hypothesis*

Hipotesis yang ini menyatakan bahwa perusahaan yang memiliki *debt to equity* yang tinggi cenderung menggunakan metode akuntansi yang dapat meningkatkan pendapatan. Perusahaan yang memiliki *debt to equity* yang tinggi akan kesulitan memperoleh pinjaman dari kreditur bahkan perusahaan terancam melanggar perjanjian utang.

3) *Political Cost Hypothesis*

Pada perusahaan yang besar cenderung memiliki biaya politik yang tinggi, sehingga manajer akan menanggukkan perolehan laba yang dilaporkan dari periode sekarang ke periode masa mendatang dengan tujuan memperkecil laba yang dilaporkan pada periode berjalan. Hal di bertujuan untuk



menghindari profitabilitas perusahaan yang tinggi agar tidak mendapatkan perhatian yang berlebih dari media dan konsumen.

Scott (2003:377) juga menambahkan beberapa motivasi lain yang mendorong manajer melakukan manajemen laba :

1) Motivasi Perpajakan (*Taxation Motivations*)

Kewenangan pajak cenderung untuk memaksakan aturan akuntansi pajak sendiri untuk menghitung pendapatan kena pajak, sehingga perolehan laba yang tinggi dapat menyebabkan perusahaan harus membayar pajak yang tinggi pula maka dari itu motivasi penghematan pajak menjadi motivasi *earnings management* yang paling nyata.

2) Motivasi Perubahan *Chief Executive Officer* (*Changes of CEO Motivations*)

Hipotesis program bonus memprediksi bahwa ketika waktu mendekati pensiun manajer atau CEO maka strategi yang dilakukan memaksimalkan laba sehingga dapat meningkatkan bonus yang akan mereka terima. Sedangkan untuk manajer atau CEO yang memiliki kinerja buruk akan melakukan *earnings management* untuk memaksimalkan laba mereka dengan tujuan mencegah atau menunda pemberhentian mereka.

3) *Initial Public Offerings*

Informasi keuangan yang ada dalam prospektus merupakan sumber informasi yang penting bagi perusahaan *go public*, karena perusahaan yang melakukan *Initial Public Offerings* tidak memiliki harga pasar yang pasti. Informasi ini dapat digunakan sebagai sinyal kepada calon investor tentang nilai perusahaan. Oleh karena itu, agen melakukan

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.





manajemen laba untuk meningkatkan labanya dengan harapan mendapatkan sinyal positif dari publik.

4) Untuk Memberikan Informasi Kepada Investor

Manajemen laba dapat memberikan informasi baik kepada investor maupun kepada kreditur. Investor dapat melihat kebijakan yang diterapkan perusahaan pada saat mengevaluasi dan membandingkannya dengan kinerja perusahaan.

Bentuk – Bentuk Manajemen Laba

Bentuk – bentuk manajemen laba yang dilakukan manajer menurut Scott (2015 : 447) antara lain :

1) *Taking a bath*

Pola ini terjadi saat perusahaan dalam keadaan butruk yang tidak menguntungkan dan tidak bisa dihindari pada periode berjalan. Jika perusahaan harus melaporkan kerugian, manajer atau CEO merasa perlu untuk melaporkan rugi yang besar. Dengan demikian, diharapkan laba pada periode berikutnya akan lebih tinggi dari seharusnya.

2) *Income Minimization*

Cara ini mirip dengan *taking a bath* tetapi lebih tidak ekstrim. Cara ini dilakukan saat profitabilitas perusahaan sangat tinggi untuk mengurangi biaya politis. Pola ini biasanya dilakukan saat perusahaan sedang mendapatkan sorotan publik selama masa keuntungan yang sangat tinggi atau untuk menghindari pajak. Salah satu caranya adalah dengan menambah biaya iklan dan R&D (*Research and Development*).



3) *Income Maximization*

Pola manajemen laba yang dilakukan dengan cara menjadikan laba pada laporan keuangan periode berjalan lebih tinggi dari pada laba sesungguhnya. *Income maximization* dilakukan saat manajer mengejar bonus dan untuk menghindari pelanggaran perjanjian utang.

4) *Income Smoothing*

Income smoothing merupakan salah satu bentuk manajemen laba yang dilakukan dengan cara menaikkan atau menurunkan laba yang dilaporkan agar laba akuntansi relatif konsisten dari periode ke periode sehingga kondisi perusahaan terlihat stabil dan mengurangi resiko. Kegunaannya adalah untuk menarik dan meyakinkan calon investor dan membuat kinerja perusahaan tampak meningkat dengan stabil.

Teknik Manajemen Laba

Menurut Gumanti (2000) teknik dan pola manajemen laba dapat dilakukan dengan tiga cara yaitu :

1) Memanfaatkan peluang untuk membuat estimasi akuntansi

Manajemen dapat mempengaruhi laba melalui perkiraan terhadap estimasi akuntansi antara lain estimasi tingkat piutang tak tertagih, estimasi kurun waktu depresiasi aktiva tetap atau amortisasi aktiva tak berwujud, estimasi biaya garansi, dll.

2) Mengubah metode akuntansi

Manajemen laba dapat dilakukan dengan mengubah metode akuntansi yang digunakan untuk mencatat suatu transaksi. Contohnya mengubah metode depresiasi aktiva tetap, dari metode depresiasi angka tahun ke metode depresiasi garis lurus.



- 3) Menggeser periode biaya atau pendapatan
- Manajemen laba dapat dilakukan dengan menggeser periode atau pendapatan. Contohnya mempercepat atau menunda pengeluaran untuk penelitian dan pengembangan sampai pada periode akuntansi berikutnya, mempercepat/menunda pengeluaran promosi sampai periode berikutnya, mempercepat/ menunda pengiriman produk ke pelanggan, mengatur saat penjualan aktiva tetap yang sudah tidak dipakai.

C Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

4. Pajak

Pengertian Pajak

Pajak memiliki peranan yang sangat penting dalam kehidupan bernegara, khususnya dalam pelaksanaan pembangunan nasional karena kemandirian suatu bangsa atau negara dalam pembiayaan pembangunannya yaitu dengan cara menggali sumber dana yang berasal dari dalam negeri itu sendiri yaitu berupa pajak. Banyak para ahli yang memberikan pengertian yang berbeda-beda mengenai definisi pajak, namun dilihat dari berbagai pengertian tersebut mempunyai inti dan tujuan yang sama. Berikut adalah definisi tentang pajak yang dikemukakan oleh para ahli.

P.J.A. Adriani dalam Waluyo (2013 : 2) memberikan batasan atas pengertian pajak sebagai berikut :

“Pajak adalah iuran kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan, dengan tidak mendapat prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk, dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubung dengan tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan.”

Rochmat Sumitro dalam Mardiasmo (2002 :1), pengertian pajak adalah:

“Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

(kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.”

Dari pengertian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa ciri-ciri yang melekat pada pengertian pajak adalah sebagai berikut:

- 1) Pihak yang berwenang memungut pajak hanyalah negara. Iuran tersebut berupa uang (bukan barang).
- 2) Pajak dipungut berdasarkan undang-undang dan sifatnya dapat dipaksakan.
- 3) Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontraprestasi individual oleh pemerintah.
- 4) Pajak diperuntukkan bagi pengeluaran-pengeluaran pemerintah dan untuk membiayai investasi.

Menurut Waluyo (2013) masalah perpajakan tidaklah sederhana hanya sekedar menyerahkan sebagian penghasilan atau kekayaan seseorang kepada negara, tetapi coraknya bermacam-macam tergantung kepada pendekatannya. Dari sudut pandang ekonomi, pajak merupakan penerimaan negara yang digunakan untuk mengarahkan kehidupan masyarakat menuju kesejahteraan. Pelayanan yang diberikan oleh pemerintah merupakan suatu kepentingan umum untuk kepuasan bersama, sehingga pajak yang mengalir dari masyarakat akhirnya kembali lagi untuk masyarakat. Di sudut aspek hukum, pajak merupakan masalah keuangan negara. Hukum pajak di Indonesia mempunyai hierarki yang jelas dengan urutan, yaitu Undang – Undang Dasar 1945, Undang – Undang, Peraturan Pemerintah, Keputusan Presiden, dan sebagainya. Sementara pemahaman dari aspek keuangan, pajak dipandang sebagai bagian yang sangat penting dalam penerimaan negara. Pendekatan dari sudut pandang sosiologi bahwa pajak ditinjau dari segi masyarakat yaitu menyangkut akibat

C Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.





atau dampak terhadap masyarakat atas pungutan dan hasil apakah yang dapat disampaikan kepada masyarakat.

© Hak Cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Definisi Pajak Penghasilan

Pengertian pajak penghasilan sesuai dengan pasal 1 Undang- Undang yaitu pajak penghasilan adalah pajak yang dikenakan terhadap subyek pajak atas penghasilan yang diterima dalam tahun pajak. Salah satu subyek pajak adalah badan, terdiri dari perseoran terbatas, perseoran komanditer, perseoran lainnya, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi, koperasi, yayasan atau organisasi yang sejenis, lembaga dana pensiun dan bentuk badan usaha lainnya. Dengan demikian, pajak penghasilan badan yang dikenakan terhadap subyek pajak tersebut, atas penghasilan yang diperolehnya dalam satu tahun pajak.

Pajak Penghasilan Wajib Pajak Badan

Wirawan B. Ilyas dan Rudy Suhartono (2013) prinsip dasar perhitungan PPh badan adalah sebagai berikut:

- 1) Penghasilan menurut UU PPh terdiri dari : Obyek PPh dan bukan Obyek PPh.
- 2) UU PPh menentukan jenis penghasilan yang bukan obyek pajak PPh dan bukan obyek PPh.
- 3) Obyek PPh terhutang PPh dan bukan Obyek PPh tidak terhutang PPh.
- 4) Obyek PPh atas penghasilan tertentu dikenakan PPh final yaitu: Tarif yang ditentukan x Jumlah Bruto.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



- 5) Obyek PPh atas penghasilan lainnya dikenakan PPh atas jumlah penghasilan neto setahun (non final).
- 6) UU PPh menentukan biaya pengurang penghasilan (biaya fiskal), biaya non fiskal (bukan pengurang penghasilan), termasuk metode penyusutan atau amortisasi dan penilaian persediaan.

Tarif Pajak Penghasilan Wajib Pajak Badan Dalam Negeri

Tarif pajak penghasilan berdasarkan pasal 17 dan pasal 31E Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 tentang pajak penghasilan, sebagai berikut:

- 1) Tarif pajak adalah sebesar 25% dari Penghasilan Kena Pajak.
- 2) Wajib Pajak badan dalam negeri yang berbentuk perseroan terbuka paling sedikit 40% (empat puluh persen) dari jumlah keseluruhan saham yang disetor diperdagangkan di Bursa Efek di Indonesia dan memenuhi persyaratan tertentu lainnya dapat memperoleh tarif sebesar 5% (lima persen) lebih rendah yang diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah.
- 3) Wajib Pajak badan dalam negeri dengan peredaran bruto sampai dengan Rp 50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah) mendapat fasilitas berupa pengurangan tarif sebesar 50% (lima puluh persen) yang dikenakan atas Penghasilan Kena Pajak dari bagian peredaran bruto sampai dengan Rp 4.800.000.000,00 (empat miliar delapan ratus juta rupiah).

5. Pajak Tangguhan

Definisi Pajak Tangguhan

Beban pajak tangguhan diakui dan disajikan sebagai beban dalam laporan laba rugi tahun berjalan, kecuali untuk beban pajak penghasilan yang berasal dari transaksi atau kejadian yang langsung dikreditkan atau dibebankan



kepada ekuitas, baik dalam periode yang sama maupun dalam periode yang berbeda.

C Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

Menurut Waluyo (2008 :216) mengartikan pajak tangguhan sebagai berikut :

“Pajak tangguhan sebagai jumlah pajak penghasilan yang terpulihkan pada periode mendatang sebagai akibat perbedaan temporer yang boleh dikurangkan dari sisa kerugian yang dapat di kompensasikan. Pengakuan pajak tangguhan berdampak terhadap berkurangnya laba atau rugi bersih sebagai akibat adanya kemungkinan pengakuan beban pajak tangguhan dan manfaat pajak tangguhan”.

Menurut Ulfah (2013) pajak tangguhan adalah saldo akun di neraca sebagai manfaat pajak yang jumlahnya merupakan jumlah estimasi yang akan dipulihkan dalam periode yang akan datang sebagai akibat adanya perbedaan sementara antara standar akuntansi keuangan dengan peraturan perpajakan dan akibat adanya saldo kerugian yang dapat dikompensasi pada periode mendatang.

Menurut Zain (2005:178) Pajak Penghasilan yang dihitung berbasis Penghasilan Kena Pajak yang sesungguhnya dibayar kepada pemerintah disebut sebagai PPh terutang, sedangkan PPh yang dihitung berbasis laba (penghasilan) sebelum pajak disebut dengan beban PPh. Sebagian perbedaan yang terjadi akibat perbedaan antara PPh terutang dengan beban pajak yang dimaksud, sepanjang menyangkut perbedaan temporer, hendaknya dilakukan pencatatan dan tercermin dalam laporan keuangan komersial dalam akun pajak tangguhan.

Penyebab perbedaan yang terjadi antara Penghasilan Sebelum Pajak dengan Penghasilan Kena Pajak dan secara potensial juga menyebabkan perbedaan antara Beban Pajak Penghasilan (PPh) dengan Pajak Penghasilan (PPh) Terutang, dapat dikategorikan dalam dua kelompok berikut ini:

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



- 1) Perbedaan Permanen atau Tetap
Perbedaan ini terjadi karena berdasarkan ketentuan perundang – undangan perpajakan, ada beberapa penghasilan yang bukan objek pajak sedangkan secara komersial penghasilan tersebut diakui sebagai penghasilan.
- 2) Perbedaan Waktu atau Sementara
Perbedaan ini terjadi karena berdasarkan ketentuan peraturan perundang – undangan perpajakan merupakan penghasilan atau biaya yang boleh dikurangkan pada periode akuntansi terdahulu atau periode akuntansi berikutnya dari periode sekarang. Perbedaan waktu (temporer) dapat berupa :
 - (a) Perbedaan temporer kena pajak adalah perbedaan temporer yang menimbulkan jumlah kena pajak untuk perhitungan laba fiskal periode mendatang pada saat nilai tercatat aktiva dipulihkan atau nilai tercatat kewajiban tersebut dilunasi.
 - (b) Perbedaan temporer yang boleh dikurangkan adalah perbedaan temporer yang menimbulkan suatu jumlah yang boleh dikurangkan untuk perhitungan laba fiskal periode mendatang pada saat nilai tercatat aktiva dipulihkan atau nilai tercatat kewajiban tersebut dilunasi.

Tabel 2.1
Perhitungan PPh Tangguhan

Beban Pajak	Penghasilan Sebelum Pajak x Tarif PPh (setelah penyesuaian dengan perbedaan permanen)
PPh Terutang	Penghasilan Kena Pajak x Tarif PPh
PPh Tangguhan	Perbedaan Waktu x Tarif PPh

Sumber : Mohammad Zain, 2005

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



b. Metode Alokasi Pajak Interperiode

Perhitungan pajak tangguhan akan muncul akun “alokasi pajak interperiode” yang digunakan untuk mencatat perbedaan temporer yang mempengaruhi hasil tahun berjalan. Metode alokasi pajak interperiode dapat dilakukan dengan tiga cara, antara lain (Zain, 2005:183):

1) *Deferred Method* (Metode Penangguhan)

Dengan menggunakan metode pajak tangguhan, maka akan terdapat semacam tabungan pajak penghasilan, karena Penghasilan Sebelum Pajak lebih besar dari Penghasilan Kena Pajak yang akan terlihat sebagai kredit pajak tangguhan pada neraca perusahaan. Metode pajak tangguhan, cenderung menekankan kepada berapa besar pajak yang dapat dihemat pada saat ini. Tarif pajak yang digunakan adalah tarif pajak pada saat munculnya perbedaan temporer tersebut. Apabila terjadi perubahan tarif pajak pada periode berikutnya atau adanya pengenaan pajak baru, hal ini tidak akan mengubah jumlah pajak tangguhan yang telah dihitung.

2) *Liability Method* (Metode Kewajiban)

Pada metode ini, memperhitungkan bahwa jumlah pajak penghasilan yang akan dibayar pada saat perbedaan temporer terpulihkan, dicatat sebagai kewajiban dalam neraca perusahaan. Kewajiban tersebut akan berkurang pada periode mendatang, pada saat pajak penghasilan terutang lebih besar dari beban pajaknya. Metode ini lebih menekankan kepada berapa besar pajak penghasilan yang akan dibayar pada periode mendatang. Agar konsisten dengan kewajiban jangka panjang lainnya, perhitungan pajak tangguhan menggunakan metode ini seharusnya menggunakan metode

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



present value terhadap perkiraan pengeluaran kas yang akan datang untuk keperluan perhitungan pajak tangguhannya.

3) *Net of Tax Method* (Metode Pajak Neto)

Metode ini memperhitungkan efek pajak yang muncul pada saat terjadinya perbedaan temporer, baik perhitungannya dengan menggunakan metode pajak tangguhan maupun metode kewajiban. Efek pajak yang timbul akan diperlakukan sebagai penyesuaian terhadap nilai individu aset atau kewajiban yang bersangkutan yang dikaitkan dengan penghasilan atau beban.

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

6. *Good Corporate Governance*

Definisi *corporate governance*

Istilah *Good Corporate Governance* pertama kali diperkenalkan oleh *Cadbury Committee* di tahun 1992 yang menggunakan istilah tersebut dalam laporan mereka yang kemudian dikenal sebagai *Cadbury Report*.

Cadbury Committee dalam Reny dan Denies (2012) mendefinisikan *Good Corporate Governanve*, yaitu seperangkat peraturan yang mengatur hubungan antara pemegang saham, pengurus (pengelola) perusahaan, pihak kreditur, pemerintah, karyawan serta pemegang kepentingan intern dan ekstern lainnya yang berkaitan dengan hak- hak dan kewajiban mereka, atau dengan kata lain suatu sistem yang mengatur dan mengendalikan perusahaan.

Menurut *Forum for Corporate Governance Indonesia* (FCGI, 2003), *corporate governance* adalah :

“Susunan aturan yang menentukan hubungan antara pemegang saham, manajer, kreditor, pemerintah, karyawan, dan stakeholder internal dan eksternal yang lain sesuai dengan hak dan tanggung jawabnya”.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang menggunakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



Demi tercapainya keberhasilan dalam penerapan *good corporate governance*, maka setiap perusahaan harus dapat mengimplementasikan prinsip-prinsip *good corporate governance*.

Asas Corporate Governance

Komisi Nasional Kebijakan Governance (KNKG) memaparkan lima asas corporate governance, yaitu:

1) Transparansi

Perusahaan harus menyediakan informasi yang material dan relevan dengan cara yang mudah diakses dan dipahami oleh pemangku kepentingan. Tidak hanya informasi yang material dan relevan, perusahaan juga diharapkan dapat menyediakan informasi secara tepat waktu, memadai, jelas, akurat dan dapat diperbandingkan serta mudah diakses oleh pemegang saham untuk pengambilan keputusan, kreditur dan pemangku kepentingan sesuai dengan haknya.

2) Akuntabilitas

Akuntabilitas merupakan prasyarat yang diperlukan untuk mencapai kinerja yang berkesinambungan. Untuk itu perusahaan harus dapat mempertanggungjawabkan kinerjanya secara transparan dan wajar. Perusahaan harus dikelola secara benar, terukur dan sesuai dengan kepentingan perusahaan dengan tetap memperhitungkan kepentingan pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya. Perusahaan harus menetapkan rincian tugas dan tanggung jawab masing-masing organ perusahaan dan karyawan secara jelas dan selaras dengan visi, misi, nilai-nilai perusahaan, dan strategi perusahaan.

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



3) **Responsibilitas**

Perusahaan harus mematuhi peraturan perundang-undangan serta melaksanakan tanggung jawab terhadap masyarakat dan lingkungan sehingga dapat terpelihara kesinambungan usaha dalam waktu jangka panjang dan mendapat pengakuan sebagai good corporate citizen.

4) **Independensi**

Untuk melancarkan pelaksanaan asas *good corporate governance*, perusahaan harus dikelola secara independen sehingga masing-masing organ perusahaan harus menghindari terjadinya dominasi oleh pihak manapun, tidak terpengaruh oleh kepentingan tertentu, beban dari benturan (*conflict of interest*) dan dari segala pengaruh atau tekanan, sehingga pengambilan keputusan dapat dilakukan secara obyektif.

5) **Kewajaran dan Kesetaraan**

Perusahaan harus memberikan kesempatan kepada pemangku kepentingan untuk memberikan masukan dan menyampaikan pendapat bagi perusahaan serta perusahaan harus senantiasa memperhatikan kepentingan pemegang saham sesuai dengan manfaat dan kontribusi yang diberikan kepada perusahaan berdasarkan asas kewajaran dan kesetaraan. Perusahaan juga harus memberikan kesempatan yang sama dalam penerimaan karyawan, dalam berkarir dan dalam melaksanakan tugasnya secara profesional tanpa membedakan suku, agama, ras, golongan, gender, dan kondisi fisik.

c. **Manfaat *corporate governance***

Pelaksanaan *corporate governance* diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut (FCGI,2003):

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



- (1) Meningkatkan kinerja perusahaan melalui terciptanya proses pengambilan keputusan yang lebih baik, meningkatkan efisiensi operasional perusahaan serta lebih meningkatkan pelayanan kepada *stakeholders*.
- (2) Mempermudah diperolehnya dana pembiayaan yang lebih murah sehingga dapat meningkatkan *corporate value*.
- (3) Mengembalikan kepercayaan investor untuk menanamkan modalnya di Indonesia. Pemegang saham akan merasa puas dengan kinerja perusahaan karena sekaligus akan meningkatkan *shareholders value* dan dividen.

d. Mekanisme *Corporate Governance*

Barnhart dan Rosenstein (1998) dalam Siallagan dan Machfoedz (2006) menyatakan terdapat dua mekanisme *good corporate governance*:

1) Mekanisme internal

Barnhart dan Rosenstein dalam Siallagan dan Machfoedz (2006) mencontohkan struktur dan dewan komisaris. Sedangkan menurut Muntiah (2014) mekanisme internal dilakukan oleh kepemilikan manajerial, ukuran dewan komisaris, komite audit, proporsi dewan komisaris independen.

2) Mekanisme eksternal

Barnhart dan Rosenstein dalam Siallagan dan Machfoedz (2006) mencontohkan mekanisme eksternal adalah mekanisme pasar yang digunakan sebagai kontrol perusahaan yang diharapkan dapat mengatasi masalah keagenan tersebut. Muntiah (2014) mekanisme eksternal terdiri dari kepemilikan institusional. Gul *et al* (2005) dalam Guna dan Herawaty (2010) mengatakan ada beberapa indikator eksternal lainnya yang dapat

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



digunakan untuk mendeteksi manajemen laba. Salah satu indikator tersebut adalah kualitas audit.

Mekanisme *corporate governance* yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah kepemilikan institusional, komite audit, dan kualitas audit karena pada penelitian ini mekanisme tersebut dianggap mampu dapat mengurangi adanya praktik manajemen laba.

a. Kualitas Audit

Menurut DeAngelo (1981) menyebutkan bahwa kualitas audit adalah probabilitas auditor perusahaan akan menemukan pelanggaran dalam sistem akuntansi dan melaporkan pelanggaran tersebut.

Tujuan dari audit laporan keuangan adalah untuk memberikan kepastian mengenai integritas dari laporan keuangan yang disajikan oleh pihak manajemen. Mayangsari (2003) menyatakan kepastian mengenai relevansi dan keandalan dari laporan keuangan perusahaan sangat diperlukan untuk membantu pihak eksternal dalam mengambil suatu keputusan bisnis. Audit laporan keuangan yang dilakukan oleh auditor yang berkualitas akan lebih dipercaya oleh pihak eksternal karena auditor yang berkualitas tersebut telah dibekali oleh serangkaian pelatihan dan prosedur serta memiliki program audit yang dianggap lebih akurat dan efektif.

DeAngelo (1981) menyatakan bahwa kualitas audit yang dilakukan oleh akuntan publik dapat dilihat dari ukuran KAP yang melakukan audit. KAP besar akan melakukan audit dengan lebih berkualitas dibandingkan dengan KAP kecil. Hal tersebut dikarenakan KAP besar lebih memiliki banyak sumber daya yang berkualitas dan lebih memiliki banyak klien sehingga mereka dianggap lebih berpengalaman.



Permintaan akan jasa audit yang berkualitas tinggi membuat auditor melakukan spesialisasi terhadap industri tertentu. Auditor yang memiliki spesialisasi terhadap industri tertentu memiliki spesifik sehingga dapat dengan cepat memahami karakteristik sebuah perusahaan. Selain itu, tambahan pengetahuan yang spesifik mengenai industri tertentu berarti kualitas audit yang diberikan kepada klien akan meningkat.

Terdapat dua cara untuk mengukur kualitas audit. Pertama, berdasarkan Teoh dan Wong dalam Mayangsari (2003) yang menyatakan audit yang dihasilkan oleh KAP *Big Four* memiliki kualitas audit yang lebih tinggi dari KAP *Non Big Four* sehingga dapat mendeteksi *error* pada laporan keuangan. Kedua, untuk mengetahui apakah suatu KAP memiliki spesialisasi industri auditor, maka diadakan suatu ambang batas. Awalnya, pada saat auditor besar diukur dengan ukuran *the Big Eight*, auditor dengan spesialisasi industri umumnya dideskripsikan sebagai auditor yang melakukan audit lebih dari 10 persen dari perusahaan suatu industri (Craswell dalam Herusetya (2009). Setelah dilakukan konsolidasi dari *Big Eight* menjadi *Big Six*, maka pengukuran spesialisasi industri menjadi 15 persen sebagai ambang batas. Knechel (2007) dalam Herusetya (2009) menggunakan ambang batas 30 persen untuk meyakinkan bahwa *The Big Four* diklasifikasikan sebagai spesialisasi industri.

B. Penelitian Terdahulu

Tabel dibawah ini merupakan penelitian terdahulu yang memiliki topik yang sama dengan penelitian ini

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

Tabel 2.2
Penelitian Terdahulu

© Hak cipta milik IBIKKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Peneliti (Tahun)	Judul	Variabel Independen	Hasil Penelitian
Yana Ulfah (2013)	Pengaruh Beban Pajak Tangguhan dan Perencanaan Pajak Terhadap Praktik Manajemen Laba	Independen : Beban pajak tangguhan Perencanaan pajak Dependen: Manajemen laba	Beban pajak tangguhan berpengaruh positif terhadap manajemen laba Perencanaan pajak berpengaruh positif terhadap manajemen laba
DRS. Subekti Djameluddin Dr. Hj. Rahmawati dan Handayani Tri Wijayanti (2007)	Analisis Perubahan Aktiva Pajak Tangguhan dan Kewajiban Pajak Tangguhan untuk Mendeteksi Manajemen Laba	Independen : Kewajiban pajak tangguhan bersih Dependen : Manajemen laba	Beban pajak tangguhan dapat digunakan untuk mendeteksi manajemen laba Akual pendapatan dan biaya dan cadangan, kompensasi, depresiasi aktiva tetap, penilaian aktiva lain-lain, item lain-lain, tax carryforward, laba dan rugi yang tidak terealisasi, akun cadangan penilaian aktiva pajak tangguhan tidak terbukti secara signifikan dapat digunakan untuk mendeteksi adanya manajemen laba
Yulianti (2005)	Kemampuan Pajak Tangguhan Dalam Mendeteksi Manajemen Laba	Independen : Beban pajak tangguhan Akual Dependen : Manajemen laba	Kedua pengukur manajemen laba yaitu akual dan beban pajak tangguhan memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap probabilitas perusahaan melakukan manajemen laba
Arisanti Widyaningsih dan Cynthia Ayu Purnamawati (2012)	Pengaruh Beban Pajak Tangguhan dan Profitabilitas Terhadap Manajemen Laba	Independen: Beban pajak tangguhan Profitabilitas Dependen : Manajemen laba	Beban pajak tangguhan berpengaruh negatif terhadap manajemen laba Profitabilitas berpengaruh positif secara signifikan terhadap manajemen laba
Santi Aryn Wiryandari dan Yulianti (2009)	Hubungan Perbedaan Laba Akuntansi dan Laba Pajak dengan Perilaku Manajemen Laba dan Persistensi Laba	Independen : Laba akuntansi Laba pajak Dependen : Manajemen laba Persistensi laba	Beban pajak tangguhan dan akual tidak terbukti dapat digunakan untuk mendeteksi manajemen laba Komponen akual dan komponen kas menjadi

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



			faktor kurangnya persistensi laba
Prabowo Yud Jayanto dan Kiswanto (2009)	<i>Deferred Tax Expense</i> dan <i>Accruals</i> dalam memprediksi Earning Management pada perusahaan manufaktur di Bursa Efek Indonesia	Independen : <i>Deferred tax expense Accruals</i> Dependen: Manajemen laba	Beban pajak tangguhan tidak berpengaruh dalam mendeteksi manajemen laba Akrual (total akrual) dengan metode Healy tidak berpengaruh dalam mendeteksi manajemen laba
Muh. Arief Ujijantho dan Bambang Agus Pramuka (2007)	Mekanisme <i>Corporate Governance</i> , Manajemen Laba, dan Kinerja Keuangan	Independen : Kepemilikan manajerial Kepemilikan institusional Proporsi dewan komisaris independen Ukuran dewan komisaris Dependen: Manajemen Laba	Kepemilikan manajerial (-) dan proporsi dewan komisaris (+) berpengaruh signifikan terhadap manajemen laba Kepemilikan institusional dan ukuran dewan komisaris tidak berpengaruh signifikan terhadap manajemen laba
Marihot Nasution dan Deddy Setiawan (2007)	Pengaruh <i>Corporate Governance</i> Terhadap Manajemen Laba di Industri Perbankan	Independen : Komposisi dewan komisaris Ukuran dewan komisaris Keberadaan komite audit Ukuran Perusahaan Dependen : Manajemen Laba	Komposisi dewan komisaris (-), ukuran dewan komisaris (+), dan keberadaan komite audit (-) berpengaruh signifikan terhadap manajemen laba Ukuran perusahaan tidak berpengaruh signifikan terhadap manajemen laba
Welvin I Guna dan Arleen Herawaty (2010)	Pengaruh Mekanisme Good Corporate Governance, Independensi Auditor, Kualitas Audit, dan Faktor Lainnya terhadap Manajemen Laba	Independen : Kepemilikan institusional Kepemilikan manajerial Komite audit Komisaris independen Independensi auditor Leverage Kualitas audit Profitabilitas Ukuran perusahaan Dependen: Manajemen laba	Kepemilikan institusional, kepemilikan manajemen, komite audit, komisaris independen, independensi auditor, dan ukuran perusahaan tidak berpengaruh signifikan terhadap manajemen laba Leverage, kualitas audit, dan profitabilitas berpengaruh signifikan terhadap manajemen laba
Rizky Drivina Jayengsari dan Soegeng Sutedjo (2013)	Pengaruh <i>Good Corporate Governance</i> , Kualitas Audit, Kompensasi Bonus, dan Ukuran Perusahaan terhadap Praktik Manajemen Laba Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia	Independen: Komisaris independen Kepemilikan institusional Kepemilikan manajerial Kualitas audit Kompensasi bonus Ukuran perusahaan Dependen: Manajemen laba	Kualitas audit berpengaruh signifikan terhadap manajemen laba Variabel lainnya tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap manajemen laba
Vinola	Peran Praktek	Independen :	Earnings management

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



Herawaty (2009) C	Corporate Governance Sebagai Moderating Variable Pengaruh Earnings Management Terhadap Nilai Perusahaan	Manajemen Laba Dependen : Nilai perusahaan (Tobin's Q) Moderating : Komisaris independen Kepemilikan manajerial Kepemilikan institusional Kualitas audit	berpengaruh signifikan terhadap nilai perusahaan Komisaris independen dan kepemilikan institusional berpengaruh signifikan terhadap nilai perusahaan Kualitas audit dan kepemilikan manajerial memiliki pengaruh yang signifikan terhadap nilai perusahaan
--------------------------	---	---	--

© Hak cipta milik IBIKKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

Kerangka Pemikiran

1) Pengaruh Beban Pajak Tangguhan Terhadap Manajemen Laba

Beban pajak tangguhan merupakan komponen dari total beban pajak penghasilan perusahaan dan mencerminkan pengaruh pajak atas perbedaan temporer antara laba akuntansi (laba dalam laporan keuangan untuk kepentingan pihak eksternal dengan laba fiskal (laba yang digunakan sebagai dasar perhitungan pajak) yang muncul akibat akrual dari item – item pendapatan dan beban yang mempengaruhi laba baik secara akuntansi maupun fiskal, tetapi dalam periode yang berbeda. Hanlon (2005) mengatakan bahwa secara spesifik sistem perpajakan dirancang untuk meningkatkan pendapatan negara, sebaliknya sistem akuntansi dirancang untuk menyediakan informasi tentang kinerja perusahaan dan diharapkan dapat menekan asimetris informasi yang mungkin terjadi antara manajemen sebagai pihak internal dan pengguna laporan sebagai pihak eksternal.

Perbedaan antara laporan keuangan akuntansi dan fiskal dapat menyediakan informasi tambahan bagi pengguna laporan keuangan untuk menilai kualitas *current earnings* (Philips, Pincus, dan Rego, 2003). Alasannya karena standar akuntansi lebih memberikan keleluasaan bagi manajemen dalam menentukan



prinsip dan asumsi akuntansi dibandingkan dengan yang diperbolehkan menurut peraturan pajak.

Konsisten dengan pernyataan di atas, Yuliati (2004) dan Philip, Pincus, Rego (2003) membuktikan bahwa beban pajak tangguhan dapat digunakan sebagai alternatif untuk membuktikan adanya praktik manajemen laba untuk menghindari kerugian. Dalam melanjutkan hasil yang diperoleh tersebut, Philips, et al (2004) menginvestigasi perusahaan – perusahaan yang terkait melakukan manajemen laba dengan perubahan dari komponen aset dan kewajiban pajak tangguhan yang merupakan refleksi dari nilai beban pajak tangguhan pada laporan laba rugi.

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Ulfah (2013) menemukan bahwa beban pajak tangguhan berpengaruh positif artinya setiap kenaikan beban pajak tangguhan, maka probabilitas perusahaan melakukan manajemen laba akan mengalami peningkatan.

2 Pengaruh Kualitas Audit Terhadap Manajemen Laba

Timbulnya praktik manajemen laba dapat dijelaskan dengan teori agensi.

Teori agensi berpendapat bahwa agen lebih memiliki banyak informasi daripada prinsipal, karena prinsipal tidak dapat mengamati kegiatan yang dilakukan agen secara terus menerus. Dalam kondisi seperti ini, maka diperlukan adanya pihak ketiga yaitu auditor sebagai pihak yang dimana dianggap mampu menjembatani kepentingan pihak prinsipal dan pihak manajer dalam mengelola laporan keuangan perusahaan. Mayangsari (2003) relevansi dan keandalan dari sebuah laporan keuangan perusahaan sangat diperlukan untuk membantu pihak eksternal dalam mengambil suatu keputusan bisnis. DeAngelo (1981) menyatakan bahwa kualitas audit yang dilakukan oleh akuntan publik dapat dilihat dari ukuran KAP yang melakukan audit.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang menggunakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

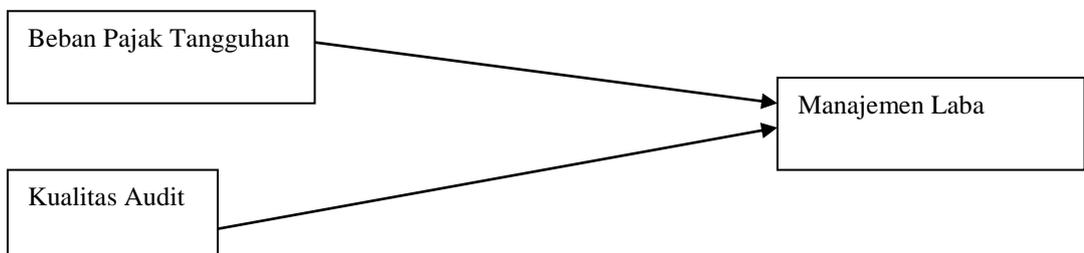


Keandalan dari suatu laporan keuangan yang telah di audit oleh KAP besar (*big four*) dipersepsikan dapat menghasilkan laporan keuangan yang lebih berkualitas dibandingkan dengan KAP kecil (*Non Big Four*). Hal tersebut dikarenakan semakin besar ukuran sebuah KAP, semakin banyak jumlah sumber daya manusia yang berkualitas yang dimiliki oleh KAP tersebut. KAP besar juga dinilai lebih berpengalaman karena lebih banyak menangani klien, selain itu reputasi KAP besar dianggap baik oleh masyarakat menyebabkan mereka akan melakukan audit dengan teliti dan berhati-hati. Dengan ketelitian yang dimiliki auditor maka auditor dapat mendeteksi adanya salah saji yang dapat berupa manajemen laba dapat membuat manajer mengurangi tindakan manajemen laba. Karena hasil laporan keuangan ini diperlukan oleh stakeholders untuk meyakinkan bahwa laporan keuangan bebas salah dari salah saji yang material.

Berdasarkan uraian diatas, dapat disimpulkan bahwa kualitas audit dapat mempengaruhi tindakan manajemen dalam melakukan manajemen laba. Dari hasil penelitian yang dilakukan oleh Guna dan Herawaty (2010) menemukan bahwa kualitas audit berpengaruh negatif signifikan terhadap manajemen laba.

Berdasarkan uraian di atas, maka kerangka pemikiran pada penelitian ini adalah.

Gambar 2.1
Skema Kerangka Pemikiran



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



D. Hipotesis Penelitian

Berdasarkan kerangka pemikiran di atas, maka hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah:

Ha1 : Beban pajak tangguhan berpengaruh positif terhadap manajemen laba.

Ha2 : Kualitas audit berpengaruh negatif terhadap manajemen laba

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak Cipta Dilindungi IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.